



Judul : DPR dahulukan musyawarah
Tanggal : Selasa, 04 Nopember 2014
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

DPR Dahulukan Musyawarah

Elite Parpol Sebaiknya Bertemu

JAKARTA, KOMPAS — Anggota parlemen dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat harus mendahulukan musyawarah dan akal sehat demi mengakhiri polemik di DPR. Setiap kelompok jangan memaksakan kehendak karena DPR lembaga representasi politik penampung aspirasi rakyat.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Panji Anugrah Permana, menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (3/11). Menurut Panji, kunci untuk keluar dari polemik di DPR adalah komunikasi.

Seperti diberitakan, selama dua pekan terakhir rakyat menyaksikan para anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mempersoalkan alokasi kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). KMP hanya menawarkan 5 dari 63 kursi pimpinan kepada KIH, tetapi hal itu ditolak karena belum mencerminkan representasi 44 persen perolehan kursi KIH di DPR.

Panji mengatakan, KMP tidak bisa memaksakan kehendak mereka untuk menguasai kursi pimpinan alat kelengkapan DPR (AKD). DPR merupakan representasi perwakilan politik rakyat

sehingga seluruh keputusan harus menampung semua kekuatan politik, termasuk dalam pembentukan alat kelengkapan DPR.

Lima partai politik dari KIH juga tidak bisa bersikukuh dengan keinginan sendiri. "Keduanya harus saling mengalah untuk bertemu dan bersepakat merumuskan kembali penyusunan pimpinan AKD. Kalau *ngotot-ngototan* terus, tidak akan ketemu (solusi)," tutur Panji.

Hal yang tidak kalah penting menjadi pertimbangan adalah pemahaman KMP dan KIH bahwa inti dari demokrasi di Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, polemik di parlemen bisa dihentikan jika para elite parpol bertemu.

Menurut Panji, polemik di DPR merupakan dampak dari kompetisi pemilihan umum presentasi yang sudah berakhir. "Saya

tidak bisa memastikan sentimen personal para elite parpol yang terlibat persaingan pilpres itu sudah hilang atau belum," ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Menurut Ronald, musyawarah di antara kedua belah pihak dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi parlemen. "Untuk itu, kami mendesak semua anggota DPR lebih mendahulukan akal sehat," kata Ronald.

Komisi bertambah

Sementara itu, di parlemen mulai tampak titik terang dengan isyarat pimpinan DPR yang bersedia menambah jumlah komisi. Pemekaran komisi dari 11 komisi yang ada dapat dilakukan untuk mengakomodasi keinginan KIH ikut memimpin komisi-komisi.

"Ini, kan, ada suara dari teman-teman (KIH) yang mau memimpin komisi dan alat kelengkapan Dewan. Ya, karena kapasitas sekretariat jenderal dan ruang terbatas, mungkin hanya menambah tiga komisi, jadinya ada 14 komisi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di Kompleks Par-

lemen, Jakarta, Senin siang.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, yang terpenting sebenarnya bukan bagi-bagi kursi pimpinan. "Bagi kami yang terpenting adalah proses penentuannya," ujar Syarif, yang tetap menginginkan musyawarah untuk mufakat.

Syarif merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan pembentukan DPR "tandingan". Perlawanan itu, kata Syarif, disebabkan kesewenang-wenangan KMP menyapu bersih kursi pimpinan DPR.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, dari awal KIH telah ditawarkan tiga kursi pimpinan alat kelengkapan DPR, lalu ditambah menjadi lima kursi pimpinan AKD. "Nah, rasional tidak apabila KIH justru meminta 16 kursi (dari 63 kursi pimpinan)," ujar Firman.

Sementara itu, rapat konsultasi terkait penentuan mitra kerja komisi-komisi penuh dengan pertanyaan dan masukan. Tarik-menarik mitra kerja menjadi topik hangat dalam rapat yang dihadiri anggota fraksi-fraksi dari KMP.

Dua mitra kerja akhirnya be-

lum disepakati pengelompokan komisinya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diperebutkan Komisi II dan V. Adapun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diperebutkan Komisi VII dan X. Kepastian dua kementerian dengan nomenklatur baru tersebut menjadi mitra kerja komisi berapa akan diputuskan dalam rapat paripurna pada Selasa (4/11).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, rencana pemekaran komisi harus dikaji tersendiri. "Jangan ada kesan untuk memasukkan anggota dari koalisi lain. Kita (DPR) harus menghindari anggapan bahwa DPR itu pragmatis," ujar Jazuli.

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto pun menginginkan jangan terlalu banyak tarik-menarik mitra kerja di Komisi. "Lebih baik dikembalikan di kondisi semula. Mohon yang dibahas hanya pada hal-hal terkait perubahan nomenklatur di pemerintahan," ujarnya.

Anggota Fraksi PAN, Teguh Juwarno, mempertanyakan posisi ekonomi kreatif apabila ditempatkan sebagai badan khusus. "Saya pikir nantinya tetap di Komisi X," ujarnya. (NTA/RYO)